



**LAPORAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan .

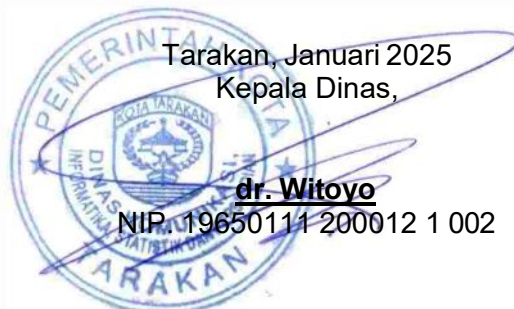
Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2024. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan .

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan
- Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2025
Kepala Dinas,

dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada visi dan misi Kota Tarakan dan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada misi 2 dengan 1 tujuan dan 1 indikator tujuan .

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **106,67 %**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA (Perangkat Daerah) Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 7.760.915.369,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 7.368.771.950,-** atau 94,95 % .

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 3 sasaran yang mencakup 5 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2024 mencapai 106,67 %**, dengan uraian : 5 sasaran dengan predikat kinerja sangat tinggi .

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Tahun 2024**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Aparat Pemerintah.....	11
D. Isu Strategis.....	14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA.....	22
A. Visi Kota Tarakan 2019-2024.....	23
B. Misi Kota Tarakan 2019-2024.....	23
C. Tujuan dan Sasaran.....	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
E. Indikator Kinerja Utama.....	29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja.....	32
B. Analisis Pengukuran Kinerja	34
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	66

BAB IV

PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Tindak lanjut rekomendasi	74

LAMPIRAN

1. Ringkasan DPA Tahun 2024
2. Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3. Metadata Variabel Statistik Sektoral
4. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024
5. Surat Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat
6. Lembar Asistensi Laporan Kinerja (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revaluasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis 2019-2024; (2) Rencana Kerja Tahun 2024, dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :



Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

b. Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi



Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas di atas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan



15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*;
4. Pengelolaan *E-Government* di lingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
6. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika



e. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.



3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPT *Tarakan Command Center* (TCC)

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .



1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .
2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris



C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya menangani urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

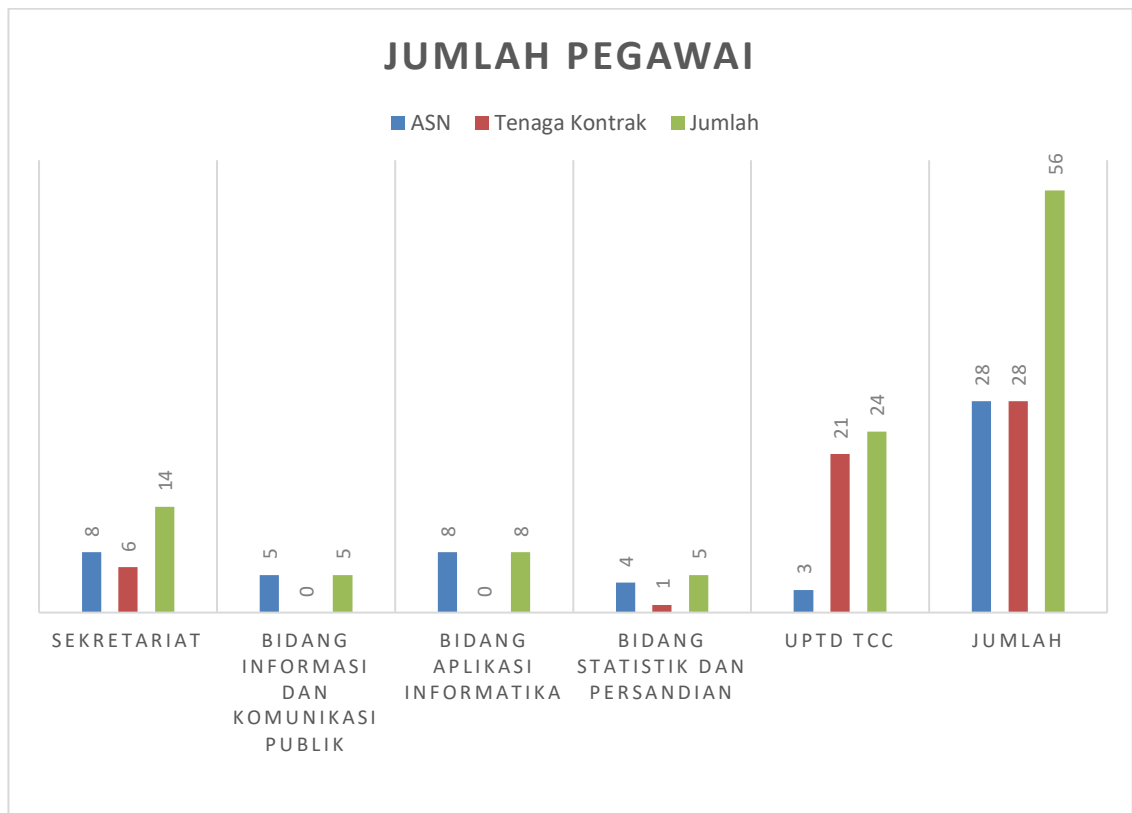
Tabel II.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5
e. UPT TCC	3	21	24
Jumlah	28	28	56

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan



Gambar II.1. Grafik Jumlah Pegawai

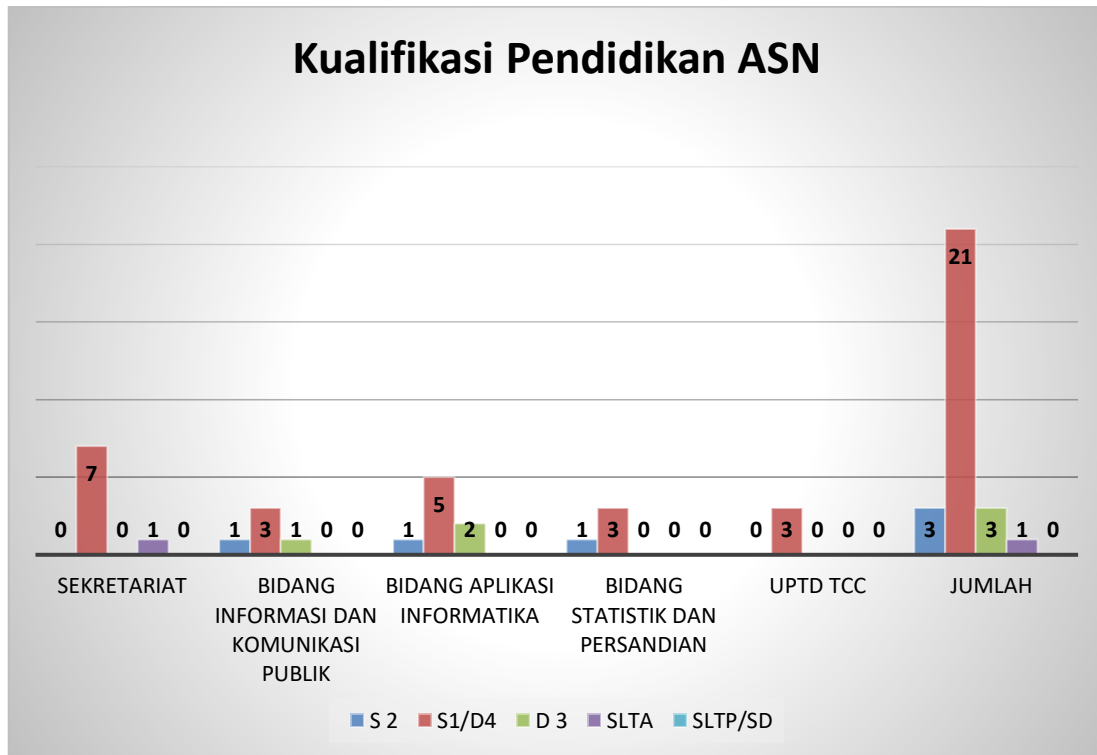


Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak)

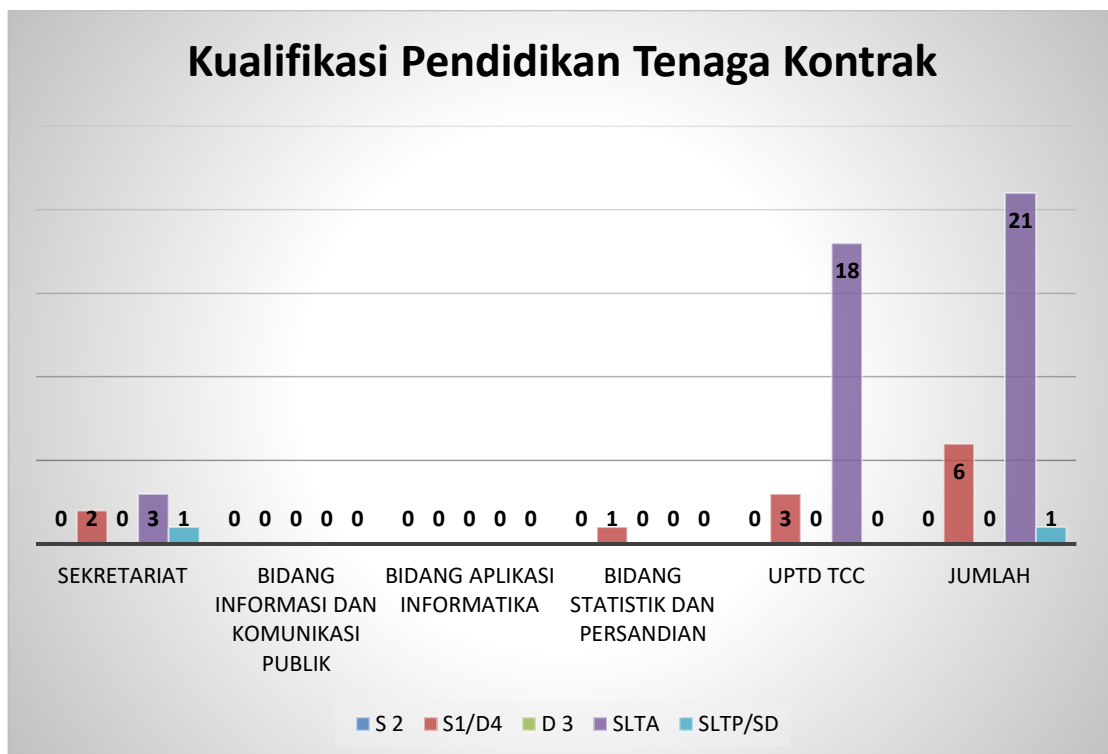
Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	-	-	7	2	-	-	1	3	-	1	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
e. UPT TCC	-	-	3	3	-	-	-	18	-	-	24
Jumlah	3	-	21	6	3	-	1	21	-	1	56



Gambar II.2. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Gambar II.3. Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan



D. ISU STRATEGIS

Demi mewujudkan Visi Kota Tarakan tahun 2019 – 2024, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mengangkat beberapa isu strategis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Publik;
2. Komitmen terhadap *E-Government* serta;
3. Penggalan Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam melaksanakan tupoksinya :

1. Belum adanya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government,
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;
5. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi);
6. Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center



Dari permasalahan diatas diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu :

1. Tataran kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Implementasi *E-Government* belum sepenuhnya diterapkan pada pengelolaan dan layanan pemerintahan Kota Tarakan

2. Implementasi program dan kegiatan pada bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan, sebagai berikut :

- a. Aplikasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi
- b. Layanan infrastruktur jaringan belum mencakup seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tarakan
- c. Pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat layanan publik maupun layanan informasi belum seluruhnya berbasis *E-Government*, sehingga layanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.

3. Teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknis masih belum tercukupi sehingga perlu pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)



- b. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal khususnya *Bandwidth* untuk seluruh OPD
- c. Sinergitas Pemerintah Kota dan media perlu dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab
- d. Belum optimalnya layanan informasi dan pengaduan masyarakat berbasis IT
- e. Belum tersedianya Pusat Data (data center) yang menyediakan data sektoral Kota Tarakan
- f. Peningkatan Layanan Publik Kegawatdaruratan melalui UPT TCC masih perlu ditingkatkan
- g. Belum terlaksananya sistem keamanan informasi oleh Pemerintah Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal yang mempengaruhi (Perangkat Daerah) Kota Tarakan antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasikan pada peningkatan kinerja.



4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Teknologi yang berkembang sangat cepat sehingga perlu adaptasi yang cepat pula dari SDM, kebijakan dan tata kelola pemerintahan
3. Dukungan anggaran yang belum memadai untuk kegiatan yang mendukung program unggulan Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam kurun waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam



penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional reengineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.



Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Peningkatan Layanan Publik berbasis Informasi Teknologi

Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri berpengaruh signifikan terhadap pola pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik saat ini harus berorientasi pada layanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih kita kenal dengan istilah *E-Government* tersebut, sebaiknya bukan hanya sekedar mengikuti tren global, melainkan juga merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.

E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Selain itu, *E-Government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat



meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, salah satu contoh penerapan *E-Government* melalui sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) terbukti menghasilkan efisiensi. Dengan penerapan satu jenis layanan berbasis *E-Government* saja pemerintah sudah dapat merasakan manfaatnya, khususnya dari segi efisiensi.

Ada beberapa poin penting yang perlu ditingkatkan dalam penerapan *E-Government* di Kota Tarakan :

Pertama, pemasifan *E-Government* Demi pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, semua OPD harus menerapkan *E-Government*. Untuk itu, infrastruktur, meliputi infrastruktur fisik, jaringan, maupun SDM juga harus dipersiapkan.

Kedua, standarisasi *E-Government* perlu adanya suatu standarisasi yang jelas dalam pelaksanaannya agar kebijakan pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu di semua OPD.

Ketiga, integrasi *E-Government*, pengembangan sistem *E-Government* diperlukan kerangka komunikasi antar sistem *E-Government* di semua OPD untuk saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk *E-Government services* yang lebih besar dan kompleks.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota harus melakukan kampanye pemasaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar tentang keberadaan dan manfaat *E-Government*.



Kelima, hal terakhir yang harus dilaksanakan adalah Pemerintah perlu terus mengevaluasi tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan *E-Government*, serta frekuensi dan intensitas penggunaan *E-Government*. Evaluasi ini penting agar pemerintah dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga dapat terus memberikan pelayanan publik yang prima.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan. Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra (Perangkat Daerah) Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, antar SKPD dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024

**“ Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera
melalui *Smart City* “**

B. Misi Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.
3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah, murah, adil, dan transparan.
4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti luas.
5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.
6. Meningkatkan pembangunan akhlak dan moral sesuai kearifan lokal serta mewujudkan kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



C. Tujuan dan Sasaran DKISP

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran DKISP adalah:

Tujuan :

“Terwujudnya pengelolaan *E-Government* yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah“

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :

- Sasaran 1 : Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan
- Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang merata
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2019)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target Akhir
Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat													
1	Terwujudnya pengelolaan e-government yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan e-government yang terintegrasi	1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	%	3 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	%	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	3	Persentase media layanan informasi publik	%	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					4	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	52 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					5	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	6	Nilai dan predikat SAKIP	Poin/ Grade	65/B	65/B	65/B	70/B	70/B	70/B



Tabel 2.2
Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Tarakan 2019-2024

Fungsi Dinas	Misi dan Tujuan Kota Tarakan	Sasaran Kota Tarakan	Strategi Kota Tarakan	Arah Kebijakan Kota Tarakan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan efisien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat	Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Sasaran 6 : Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Strategi 4 : Reformasi birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Arah Kebijakan 15 : Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan kelitbangan daerah Arah Kebijakan 16 : Peningkatan akuntabilitas perangkat daerah Arah Kebijakan 18 : Peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
	Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Perubahan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN**

No .	Sasaran	N o	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1.	Persentase PD yang terkoneksi bandwidth server	100 % (30 OPD)
2.	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2.	Persentase media layanan informasi publik	100 % (5 jenis)
		3.	Persentase PD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	100 % (30 OPD)
		4.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100 % (6 aplikasi)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	5.	Nilai/predikat SAKIP	79,55/BB

E. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis (Perangkat Daerah), perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis PD dengan 6 (enam) indikator kinerja . Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	$\frac{\sum \text{PD yang terkoneksi dengan bandwidth server}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Aplikasi Informatika
	2	Persentase kontribusi provider telekomunikasi	$\frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang berkontribusi}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} \times 100 \%$	%	100 %	Laporan Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi	Bidang Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	1	Persentase media layanan informasi publik	$\frac{\sum \text{media layanan informasi publik yang digunakan untuk meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi}}{\sum \text{media layanan informasi publik}} \times 100 \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Informasi dan Komunikasi
	2	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	%	100 %	Laporan Data Sektoral Kota Tarakan	Bidang Statistik dan Persandian
	3	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	$\frac{\sum \text{aplikasi layanan publik yang terealisasi yang digunakan OPD}}{\sum \text{aplikasi layanan publik yang dianggarkan}} \times 100 \%$	%	100 %	Laporan Konsolidasi Pembangunan	Bidang Aplikasi Informatika
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	1	Nilai/predikat SAKIP	Nilai/predikat SAKIP	Poin/ Grade	70/B	LHE SAKIP	Sekretariat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.



Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah.

Pelaporan kinerja Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh DKISP.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d < 90	Tinggi
3	66 s/d < 75	Sedang
4	51 s/d < 65	Rendah
5	0 s/d < 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Capaian Kinerja DKISP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	30 OPD 100 %	30 OPD	100,00 %
2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	5 Jenis 100 %	5 Jenis	100,00 %
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	30 OPD 100 %	30 OPD	100,00 %
		Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	6 Aplikasi 100 %	8 Aplikasi	133,33 %
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat SAKIP	79,55/BB	79,55/BB	100,00 %
CAPAIAN KINERJA					106,67 %

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Sampai Dengan Tahun Kelima (2024)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020 (%)	Realisasi 2021 (%)	Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 thd Target Renstra (%)
							Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	30 OPD	30 OPD	100,00	100,00	100,00
2	Persentase media layanan informasi publik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	5 Jenis	5 Jenis	100,00	100,00	100,00
	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	%	81,25	90,00	93,33	96,67	30 OPD	30 OPD	100,00	100,00	92,25
	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	6 Aplikasi	8 Aplikasi	133,33	100,00	106,67
3	Nilai/Predikat SAKIP	Poin/ Grade	63,80/B	50,48/ CC	65,41/B	71,03/ BB	79,55/ BB	79,55/ BB	100,00	70/B	113,64



Pencapaian kinerja 5 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2023

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	5
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	-
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	-
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	-
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah	-
Total Sasaran			5

B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan : Terwujudnya pengelolaan *E-Government* yang terintegrasi di seluruh perangkat daerah

Sasaran 1	: Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan
Indikator 1	: Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan

Indikator 1 : Persentase OPD yang terkoneksi bandwidth server adalah perbandingan antara perangkat daerah yang terkoneksi bandwidth server dengan jumlah keseluruhan perangkat daerah dikalikan seratus persen .

Untuk menghitung persentase OPD yang terkoneksi dengan bandwidth Tahun 2022 menggunakan rumus :



$$\frac{\sum \text{OPD yang terkoneksi dengan bandwidth server}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2024 dari target 30 OPD yang terkoneksi bandwidth server dapat terealisasi seluruhnya, dengan kapasitas bandwidth sebesar 18 Mbps untuk layanan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD .

Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu sebesar 100 % atau 30 OPD, sedangkan anggaran bandwidth internet untuk seluruh perangkat daerah masih berada di masing-masing Perangkat Daerah .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1
Indikator 1 :

Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Total anggaran yang tersedia untuk Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebesar Rp 514.500.000,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Sewa bandwidth NOC dan Data Center	191.808.000	18 Mbps, 12 bulan
2.	Pemeliharaan NOC, Data Center dan jaringan	5.872.000	12 bulan
3.	Jasa Sewa Call Center 112, domain dan hosting serta sewa lisensi ID zoom	221.200.000	12 bulan
4.	Belanja Modal Tripod dan PC all in one	82.800.000	1 Paket
5.	Pelatihan teknis dan Rakor teknis pengelolaan pengembangan e-gov	12.820.000	12 bulan

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

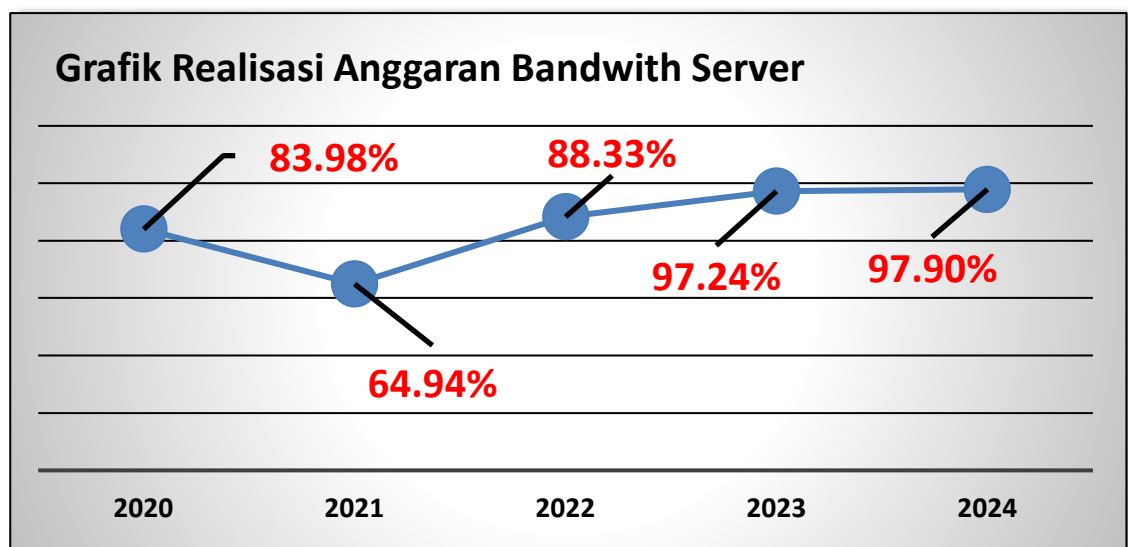
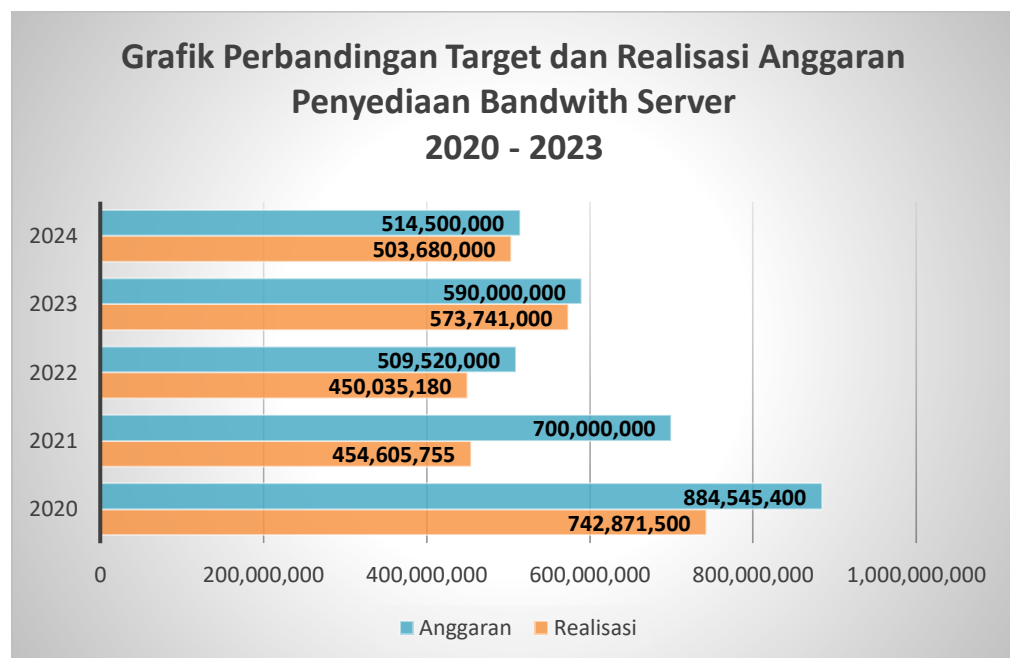
1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (**SPBE**)
2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui *Smart City* sehingga banyak kegiatan/layanan publik yang dilaksanakan dengan sistem elektronik dan tentunya hal ini sangat membutuhkan ketersediaan jaringan dan bandwidth server yang memadai
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwidth untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :



No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	884.545.400	742.871.500	83,98
2.	2021	700.000.000	454.605.755	64,94
3.	2022	509.520.000	450.035.180	88,33
4.	2023	590.000.000	573.741.000	97,24
5.	2024	514.500.000	503.680.000	97,90

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024



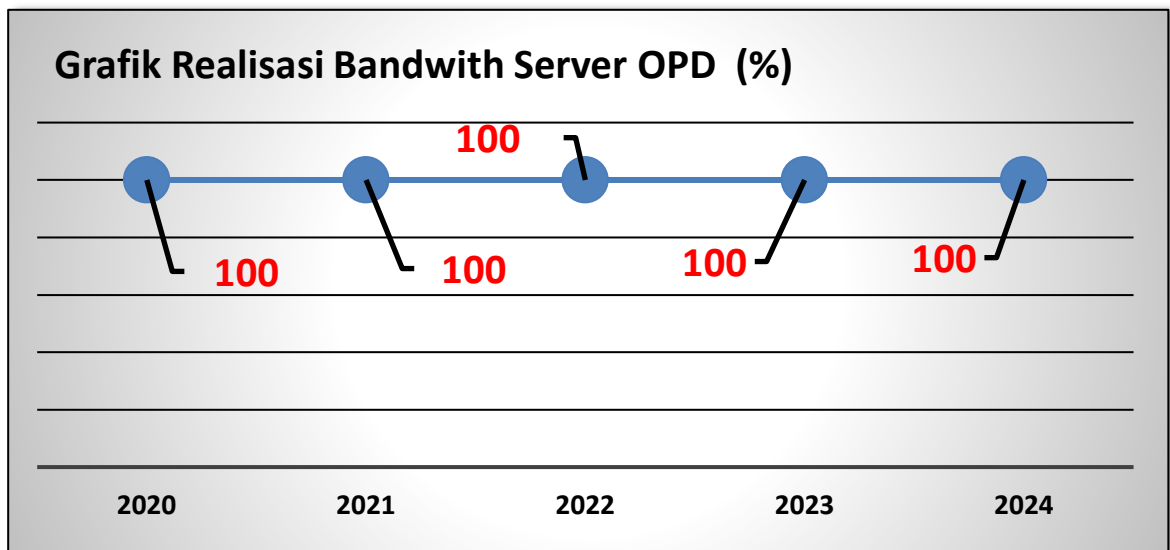


Untuk tahun 2023 layanan bandwidth untuk PD telah menggunakan jaringan *fiber optic* yang pengerjaan dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Perumda Tarakan Media Telekomunikasi dibawah pengawasan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun belum mencakupi seluruh OPD hanya PD di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Barat sedangkan PD yang berada di wilayah Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara masih menggunakan jasa PT Telkom .

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi OPD yang Terkoneksi *Bandwith Server* untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Target Jumlah OPD	Realisasi	Persentase	Kategori/Keterangan
1.	2020	32 OPD	32 OPD	100 %	Kapasitas bandwidth sebesar 15 Mbps untuk layanan publik Call Center 112, Fleet Management System dan aplikasi pengaduan e-Clue
2.	2021	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwidth sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
3.	2022	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwidth sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
4.	2023	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwidth sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwidth sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwidth server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024



Sasaran 2	:	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata
Indikator 1	:	Persentase media layanan informasi publik
Indikator 2	:	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral
Indikator 3	:	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi

Indikator 1 : Persentase media layanan informasi publik

Persentase media layanan informasi publik adalah perbandingan jumlah media layanan umum yang digunakan meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi dengan jumlah media layanan informasi publik dikalikan seratus persen

Didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang



Penyelenggaraan Statistik, dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ;

Untuk menghitung persentase media layanan informasi publik Tahun 2023 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Media layanan informasi publik yang digunakan meningkatkan akses dan diseminasi komunikasi serta informasi}}{\sum \text{Media layanan informasi publik}} \times 100 \%$$

Tahun 2023 dari target 5 media layanan informasi yang ada semuanya telah digunakan oleh pemerintah kota untuk menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Dari hasil perhitungan persentase media layanan informasi publik Tahun 2023 dapat disimpulkan dari 5 target media informasi keseluruhannya telah digunakan untuk diseminasi komunikasi serta informasi atau capaian kinerja sebesar 100 % .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 2
Indikator 1:

Program : Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik

Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik

Sub Kegiatan : Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan



Total anggaran yang tersedia untuk Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 1.416.959.332,- dengan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik RP 1.302.007.092,-
2. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp 70.000.000,-
3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp 29.952.240,-
4. Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Rp 15.000.000,-

Beberapa item kegiatan yang dilaksanakan dalam menunjang tercapainya target Sasaran 2 Indikator 1 disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Belanja desiminasi dan publikasi	1.235.000.000	Publikasi Iklan/Reklame/Advertorial pada media cetak, elektronik, online di media local, regional dan nasional
2.	Pembuatan video Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	57.307.692	Kerja sama dengan pihak 3 untuk pembuatan video promosi dan Pembangunan Kota Tarakan
3	Belanja perjalanan dinas	9.699.400	Perjalanan dinas untuk kegiatan peliputan dan koordinasi
3.	Belanja cetak publikasi	42.886.530	Cetak cover baliho dan spanduk untuk bahan publikasi
4.	Pemeliharaan Stand Baliho dan videotron	7.513.470	Kegiatan perbaikan/pemeliharaan pada Stand Baliho dan Videotron yang berada di bawah pengawasan DKISP
5.	Bongkar pasang cover baliho	19.600.000	Biaya untuk bongkar dan pasang cover baliho sebanyak 28 item/buah

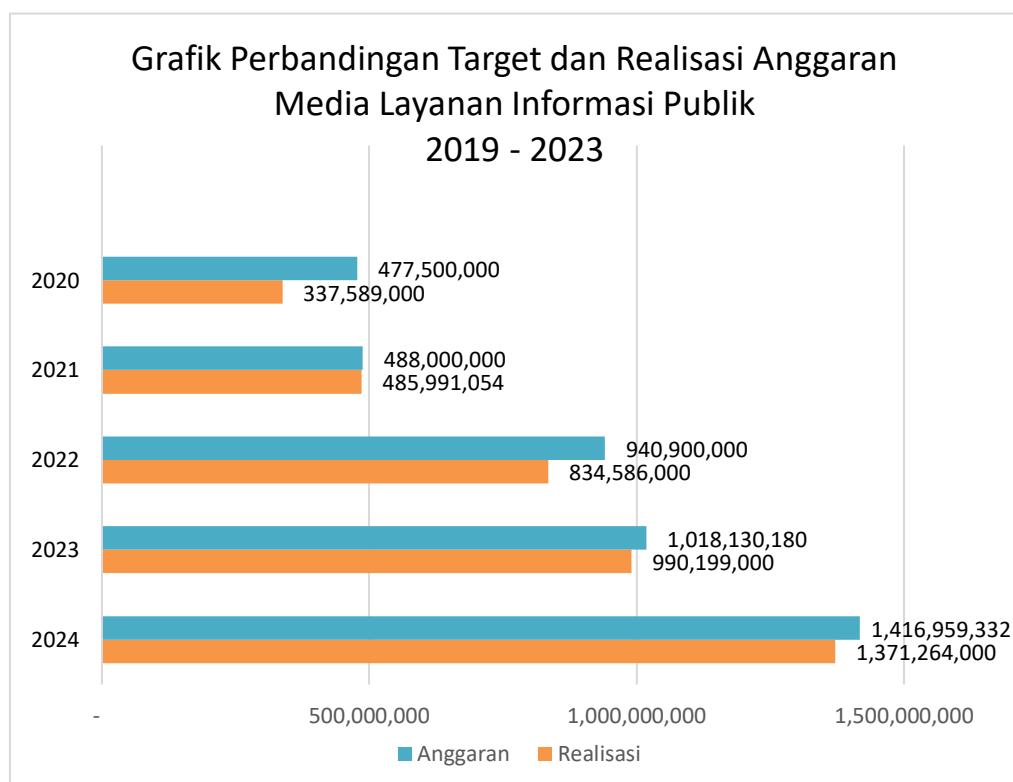


6.	Kegiatan PPID	29.952.240	Kegiatan sosialisasi dan pembinaan pada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Perangkat Daerah
7.	Belanja makan minum rapat	15.000.000	Kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	477.500.000	337.589.000	70,70
2.	2021	488.000.000	485.991.054	99,59
3.	2022	940.900.000	834.586.000	88,70
4.	2023	1.018.130.180	990.199.000	97,11
5.	2024	1.416.959.332	1.371.264.000	96,78

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024





Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti :

Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk

mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.

3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal

sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan dengan baik

Adapun media layanan informasi yg digunakan adalah :

1. Media Massa

Informasi disampaikan melalui surat kabar, tabloid dan majalah





2. Media Elektronik

Informasi pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kota disampaikan melalui media publik seperti Kompas TV dan Equator TV .



7. SHORT VIDEO 15 – Kunjungan Menteri PPPA ke SMPN 2 (tgl.kegiatan 26 Juni 2024)



8. SHORT VIDEO 16 – Posyandu Mamburungan & Kampung I (tgl.kegiatan – 27 Juni 2024)





3. Media Luar Ruang

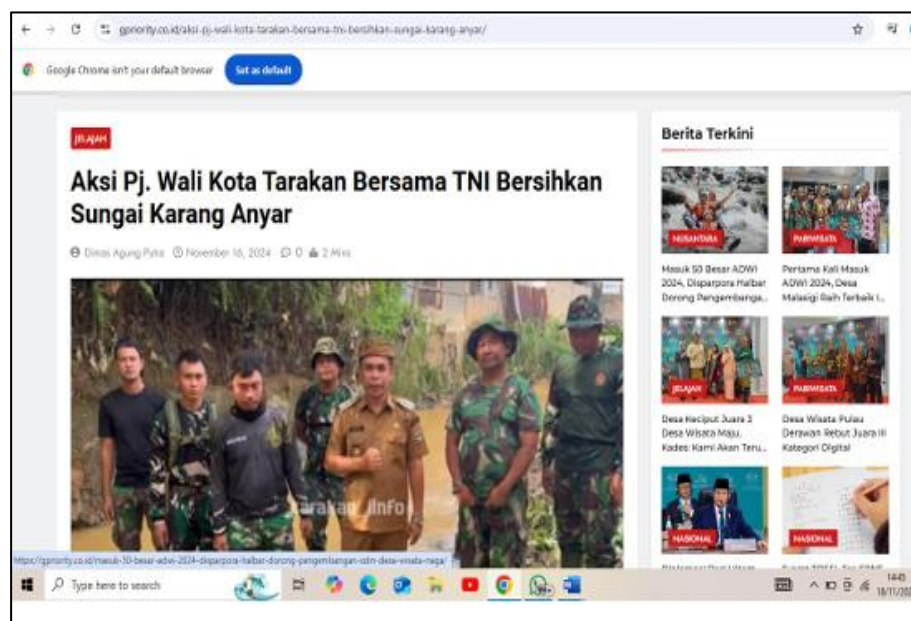
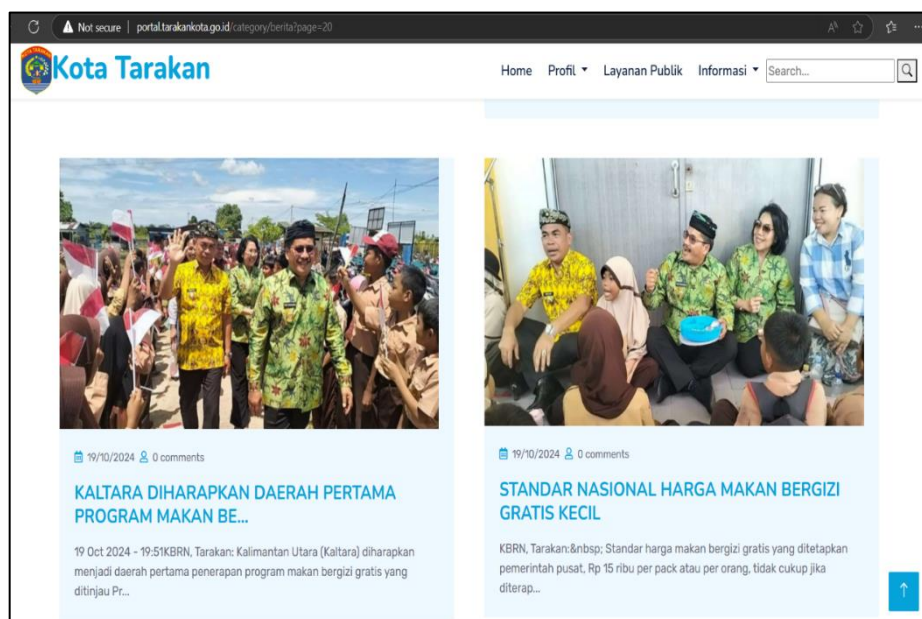
Media luar ruang yang ada berupa spanduk, stand baliho dan videotron semuanya telah digunakan untuk penyampaian informasi pembangunan dan pelayanan pemerintah kota





Media Baru

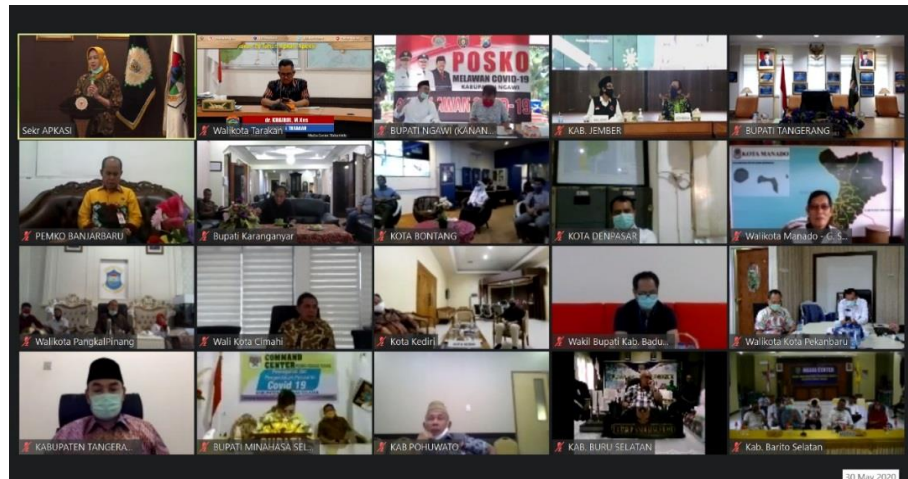
Diseminasi informasi melalui media baru yang digunakan adalah media online melalui Website : www.tarakankota.go.id. dan media online lain yang dikelola DKISP seperti Facebook dan Instagram selain itu juga melalui media online pihak ketiga seperti Liputan 6.com, Merdeka.com, Video.com, Tribun Kaltara.com, Fokus Borneo.com, Jendela Kaltara.com dll .





4. Media Interpersonal

Sarana media yang dimiliki oleh DKISP berupa media center akan tetapi setelah pandemic covid-19 terjadi pergeseran/perubahan kebiasaan melakukan rapat dan pertemuan dimana banyak pertemuan dan dialog dilakukan secara daring/online, menindaklanjuti kebiasaan tersebut DKISP memberikan layanan untuk fasilitasi pelaksanaan zoom meeting dan menyiapkan ruang rapat dengan fasilitas daring sehingga dialog interaktif antar stakeholder, wartawan/media maupun dengan masyarakat luas dapat dilaksanakan secara daring/online



Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
2.	2021	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru



3.	2022	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
4.	2023	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
5.	2024	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Indikator 2 : Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral

Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral adalah perbandingan OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dengan jumlah OPD dikalikan seratus persen.

Untuk menghitung persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral Tahun 2024 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Data Sektoral Kota Tarakan bahwa OPD yang berkontribusi sebanyak 30 OPD dari target 30 OPD atau 100,00 %, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya 96,67 % .



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran

2 Indikator 2 :

Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Rp sebesar 69.889.910,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Cetak Buku PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Kota Tarakan	11.257.350	Cetak buku dengan sumber data dari BPS Kota Tarakan
2.	Belanja Rapat Koordinasi Wali data	16.800.000	Makan dan Minum Rapat Koordinasi Wali data
3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.838.800	Kegiatan Rakor Penyelenggaraan Statistik Daerah
4.	Cetak Buku Data Statistik Sektoral Kota Tarakan dan Kota Tarakan Dalam Angka 2024	9.994.130	Cetak buku dengan sumber data dari BPS dan hasil Kompilasi Data Sektoral Kota Tarakan
5.	Kegiatan FKSD	14.999.630	Kegiatan Rakor Forum Komunikasi Statistik Daerah



Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	24.700.000	18.665.000	75,57
2.	2021	40.000.000	32.107.500	80,27
3.	2022	39.999.500	30.639.860	76,60
4.	2023	39.999.360	24.344.550	60,86
5.	2024	69.889.910	64.425.400	92,18

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024



1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

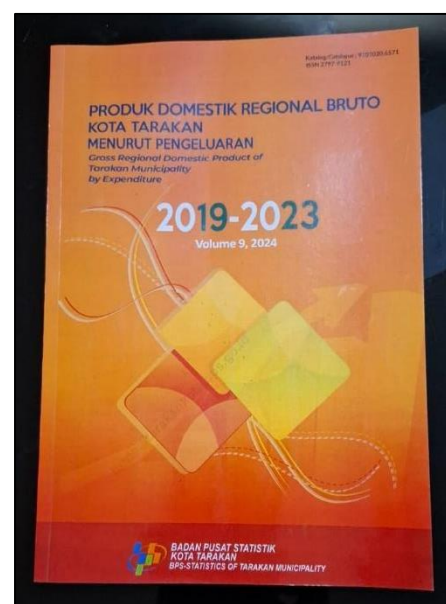
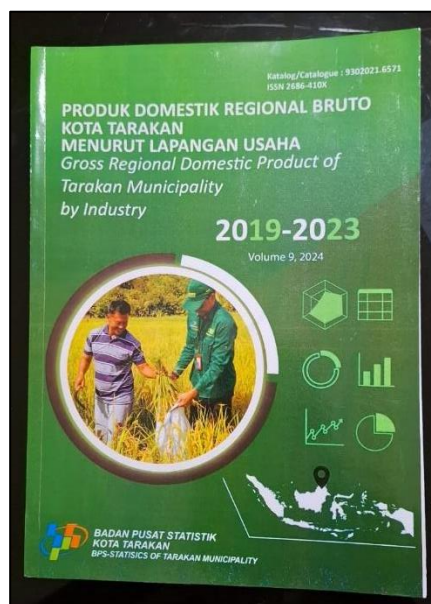


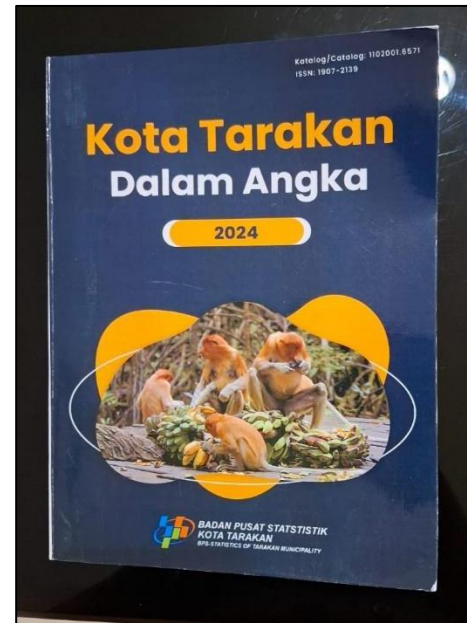
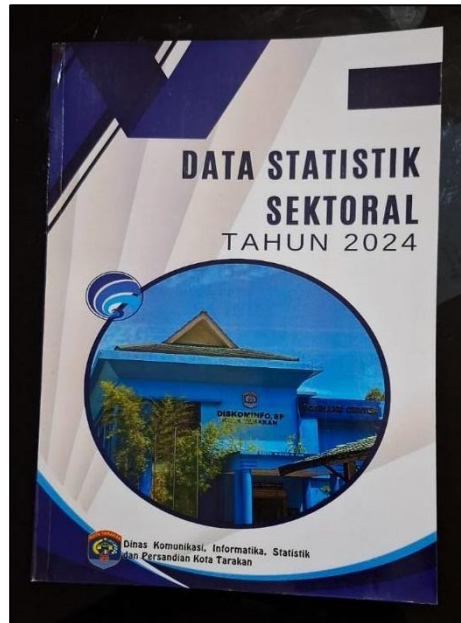
2. Dilaksanakannya Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD) sebagai upaya penyamaan persepsi dalam penyusunan Metadata Variabel Statistik Sektoral
3. Dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai mitra dan penyedia data statistik

Target dan realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tahun	Target OPD	Realisasi	Persentase (%)	Kategori
1.	2020	32 OPD	26 OPD	81,25 %	Tinggi
2.	2021	30 OPD	27 OPD	90,00 %	Sangat Tinggi
3.	2022	30 OPD	28 OPD	93,33 %	Sangat Tinggi
4.	2023	30 OPD	29 OPD	96,67 %	Sangat Tinggi
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100,00 %	Sangat Tinggi

Sementara dari hasil kompilasi pengumpulan data telah dipublikasikan melalui pembuatan buku PDRB Menurut Lapangan Usaha, PDRB Menurut Pengeluaran, Data Statistik Sektoral Kota Tarakan Tahun 2024 dan Kota Tarakan Dalam Angka 2024 .





Untuk tahun 2025 akan ada perubahan indikator pada bidang statistik menyesuaikan dengan Renstra 2025-2026 dari yang semula Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral menjadi Indeks Pembangunan Statistik sehingga bisa dijadikan benchmarking atau perbandingan hasil realisasi capaian PD dengan realisasi di tingkat provinsi dan nasional .

Indikator 3 : Persentase aplikasi layanan publik / tata kelola pemerintah yang terintegrasi

Persentase aplikasi layanan publik / tata kelola pemerintah yang terintegrasi adalah banyaknya aplikasi yang tersedia dan terintegrasi agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan yang berada, serta pengaduan pelayanan publik, dimana peran masyarakat sebagai salah satu pengawas eksternal pelaksanaan pelayanan publik semakin penting. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,



Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

Untuk menghitung aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi Tahun 2024 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{aplikasi layanan publik yang terealisasi yang digunakan OPD}}{\sum \text{aplikasi layanan publik yang ditargetkan}} \times 100 \%$$

DKISP Kota Tarakan telah merealisasikan 8 aplikasi layanan publik pada Tahun 2024 dari target 6 aplikasi yang ditetapkan/dianggarkan atau dengan capaian kinerja 133,33 % .

Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Alokasi Anggaran untuk mendukung Sasaran 2 Indikator 3 sebesar Rp sebesar 403.315.000,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	168.319.400	Pengembangan software aplikasi Dashboard TCC, pemeliharaan aplikasi, workshop pengelolaan website, workshop SPBE, Bimtek web dan mobile programing



2.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	234.995.600	Operasional petugas Call center 112, Sewa jalur jaringan CCTV, pemeliharaan sarana dan prasarana TCC
----	--	-------------	--

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	346.250.000	267.020.000	77,12
2.	2021	514.900.000	400.062.000	77,70
3.	2022	379.509.500	335.589.736	88,43
4.	2023	455.000.000	418.888.048	92,06
5.	2024	403.315.000	341.130.057	84,58

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024



Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis



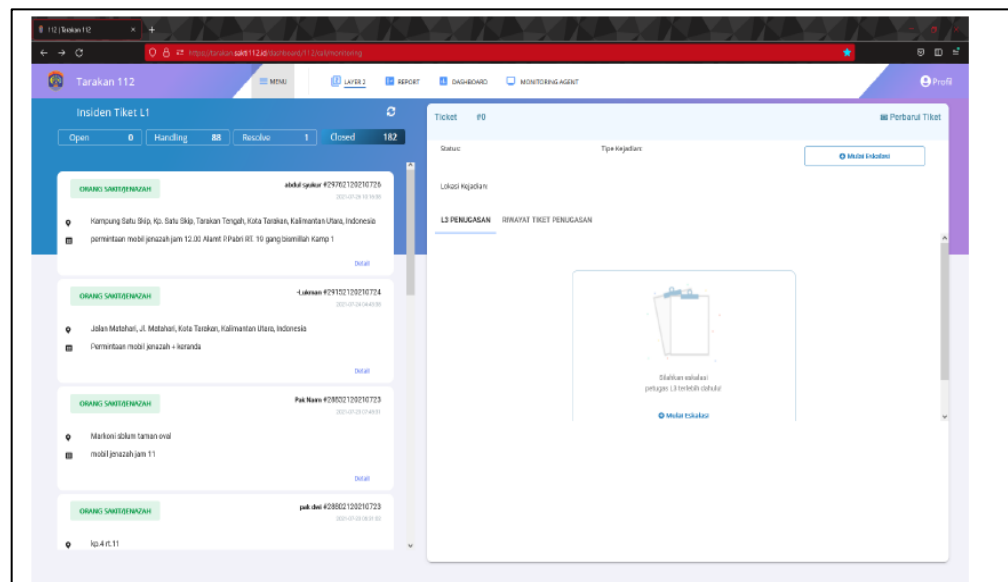
Elektronik (**SPBE**) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Nomor Tunggal Panggilan Darurat

2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui *Smart City* sehingga dibutuhkan ketersediaan aplikasi untuk memudahkan layanan dan informasi yang mudah, murah dan cepat kepada masyarakat
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Aplikasi yang dibuat, dikembangkan dan disewa pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Layanan Cal Center 112

Aplikasi layanan call center 112 adalah layanan 112 merupakan layanan call center 24 jam yang menghubungkan panggilan kegawat daruratan untuk pemadam kebakaran, ambulans angkut, mobil jenazah yang terintegrasi dan gratis untuk masyarakat





Browser window showing the Tarakan Command Center (TCC) website. The URL is tcc.tarankota.go.id. The page features the TCC logo and navigation links: Beranda, Tentang Kami, Layanan, Portfolio, and Tim TCC.

Tarakan Command Center TCC

Langkah nyata mewujudkan visi Kota Tarakan Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City.

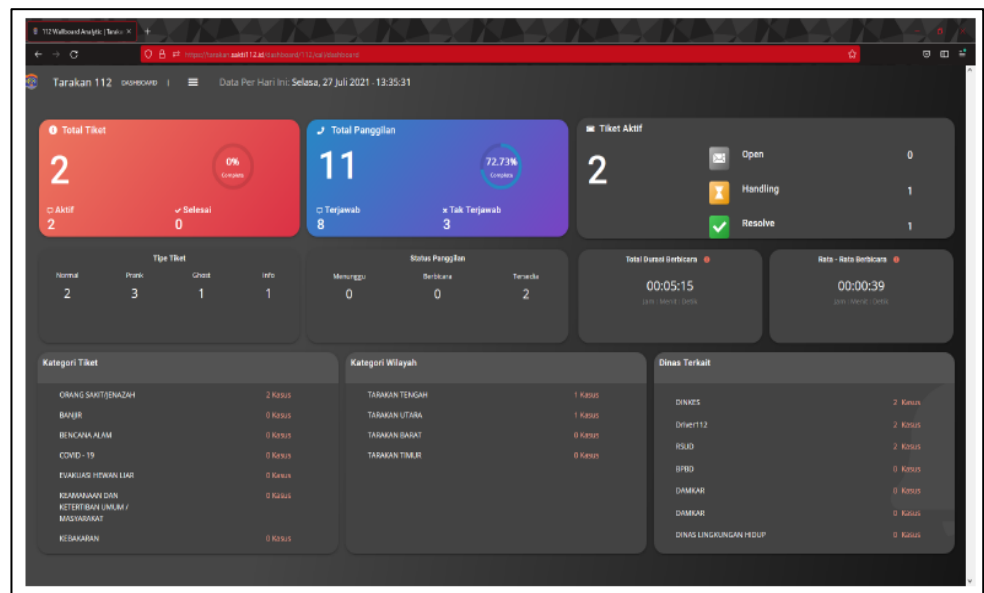


Aktualisasi Smart City dan Pusat Pelayanan Informasi Publik

command center merupakan pusat layanan terintegrasi yang berfungsi sebagai penerima pengaduan/pelaporan insiden darurat dan monitoring serta pengawasan dan pengendalian operasi insiden darurat (kebakaran dan kegawat darurat lainnya)

Dasar Hukum
Keputusan Walikota Tarakan Nomor 067/HK-III/67/2019.

Sasaran
Untuk Mempercepat dan memudahkan penyampaian informasi saat terjadi keadaan darurat



Browser window showing the Tarakan Command Center (TCC) website. The URL is tcc.tarankota.go.id. The page features the TCC logo and navigation links: Beranda, Tentang Kami, Layanan, Portfolio, and Tim TCC.

Tarakan Command Center

Layanan Command Center merupakan salah satu inovasi pelayanan publik dalam merespon pengaduan darurat masyarakat tarakan.

[MULAI MENJELAJAH](#) [Tonton Video](#)

PRAKATA

Tarakan Command Center TCC

Langkah nyata mewujudkan visi Kota Tarakan Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju Dan Sejahtera Melalui Smart City.



2. Aplikasi Video Analytic

Aplikasi untuk pemantauan CCTV di beberapa titik lokasi jalan utama di Kota Tarakan, aplikasi ini dikelola oleh UPT Tarakan Command Center (TCC)

Screenshot atau tangkapan layar dari aplikasi video analytic dapat dilihat pada gambar berikut :

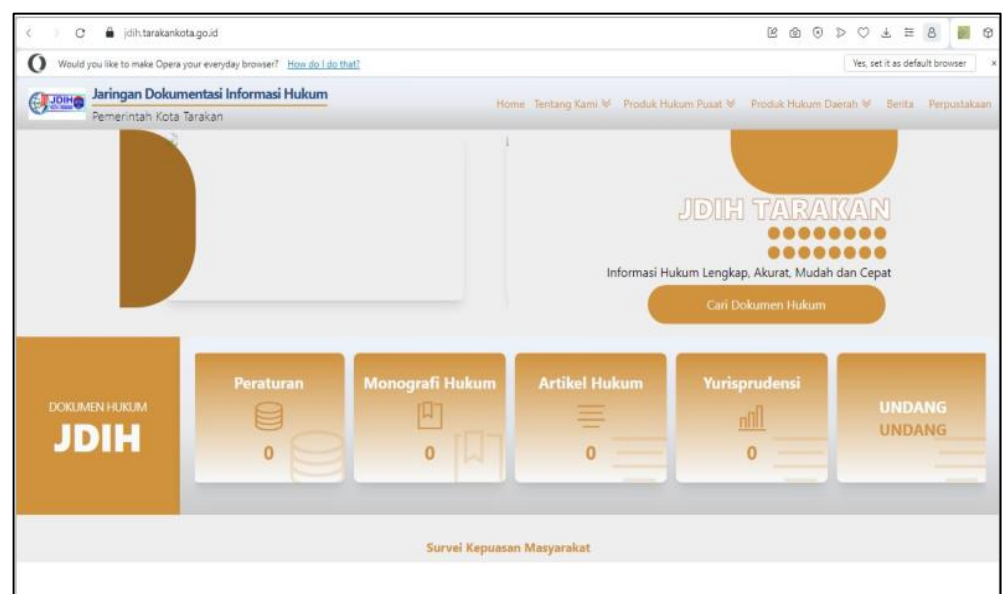




3. Website Website JDIH (Pengembangan)

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah platform yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi hukum yang cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat dan pemerintah. Website JDIH biasanya dikelola oleh instansi pemerintah, seperti kementerian, pemerintah daerah, atau lembaga terkait lainnya.

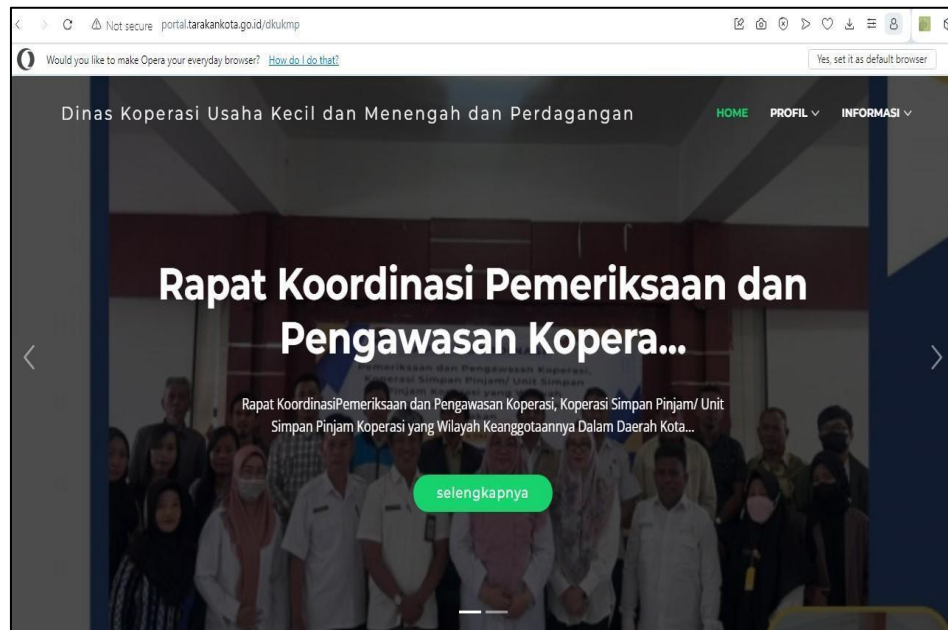
Berikut ini tangkapan layar website JDIH :



4. Website DKUKMP (Pengembangan)

Website Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah platform yang menyediakan informasi, layanan, dan program terkait dengan pengembangan koperasi, perdagangan, serta UMKM di Kota Tarakan.

berikut ini menunjukkan laman DKUKMP :



5. PPDB Online (Pemeliharaan)

Website PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Kota Tarakan adalah platform online yang digunakan untuk mengelola proses penerimaan siswa baru di berbagai jenjang pendidikan di Kota Tarakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan pendaftaran, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan proses seleksi masuk ke sekolah-sekolah yang ada.

Berikut ini tangkapan layar aplikasi PPDB :



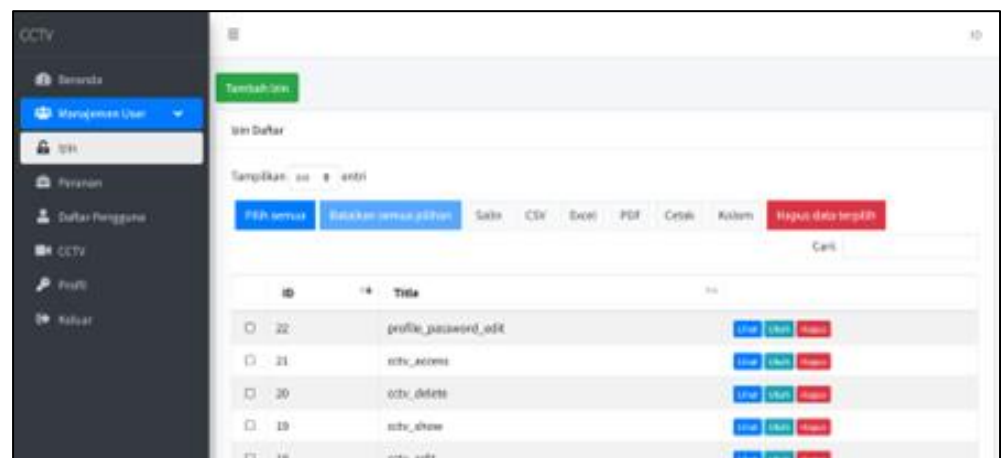


6. Aplikasi CCTV (Pengembangan)

Pengelolaan jaringan CCTV yang efektif memerlukan sistem yang terintegrasi untuk pemantauan, pengelolaan data, dan manajemen perangkat secara efisien. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan CCTV oleh Kantor TCC DKISP Kota Tarakan.

Tujuan Pengembangan :

- Mempermudah pemantauan lokasi yang dilengkapi CCTV secara real-time melalui peta interaktif.
- Menyediakan fitur manajemen perangkat CCTV, pengguna, dan administrasi data.
- Mempermudah analisis data CCTV untuk pengambilan keputusan operasional.





7. Aplikasi Presensi BKPSDM (Pengembangan)

BKPSDM Kota Tarakan membutuhkan sistem presensi yang modern dan efisien untuk mencatat kehadiran pegawai secara real-time. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan perangkat presensi dengan sistem berbasis web, sehingga mempermudah pengelolaan data presensi.

Tujuan Pengembangan

- Mengotomasi proses pencatatan kehadiran pegawai.
- Memberikan laporan kehadiran secara terintegrasi dan mudah diakses.
- Mengintegrasikan perangkat presensi dengan aplikasi berbasis web.
- Mempermudah pemeliharaan dan pengelolaan perangkat presensi.

The screenshot shows a web application interface for managing devices. It includes a search bar, a table with columns for SN, Alias, Status, Last Activity, FW Version, Device Name, User Count, and FP Count, and a pagination bar at the bottom.

SN	Alias	Status	Last Activity	FW Version	Device Name	User Count	FP Count
WAE4243000075	192.168.1.72	Online	2024-11-19 22:33:06	ZAMI80-NF28VA-Ver3.0.42	X900	1	0

The screenshot shows a web application interface for monitoring device transactions. It includes a sidebar menu, a top navigation bar, and a table with columns for #, Time, Employee, Device, State, and Verification.

#	Time	Employee	Device	State	Verification
18488672	2024-11-19 22:32:37	91088 Awal	AEWD203260113 (192.168.1.201)	Check in	Face
18488671	2024-11-19 22:32:21	91088 Awal	C.JH9212260088 (192.168.1.13)	Check in	Face
18488670	2024-11-19 22:30:33	91119 Siswanto	C.JH9194660346 (192.168.1.96)	Check in	Face
18488669	2024-11-19 22:30:24	91027 EKO BUDI SUKAMTO	AEWD194760472 (192.168.1.201)	Check in	Face
18488668	2024-11-19 22:27:56	92308 Yohanis	AEWD203260113 (192.168.1.201)	Check in	Face
18488667	2024-11-19 22:27:51	92308 Yohanis	C.JH9212260088 (192.168.1.13)	Check in	Face



8. Aplikasi SIMPEG (Pengembangan)

BKPSDM Kota Tarakan memerlukan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) untuk mengelola data kepegawaian secara terpusat dan efisien. Salah satu modul utama yang dikembangkan adalah modul Kenaikan Gaji Berkala (KGB), yang mempermudah pengelolaan kenaikan gaji pegawai secara otomatis dan akurat.

Tujuan Pengembangan

- Mempermudah pengelolaan data kenaikan gaji berkala pegawai.
- Meningkatkan efisiensi proses administrasi kepegawaian.
- Mengintegrasikan seluruh data kepegawaian dalam satu sistem yang mudah diakses.
- Menyediakan laporan nominasi dan daftar jaga untuk mendukung pengambilan keputusan.

No	Nama Jabatan	Pangkat	TMT KGB	No. SK	MASA TH	Action
1	PENGADMINISTRASI UMUM	II/d	01/05/2023	800.1.11.13.2/052-II-KGB/BKPSDM	21	 
2	PENGADMINISTRASI UMUM	II/c	01/05/2019	822.2/073-II-BKPP	17	 
3	Fungsional Umum	II/c	01/05/2017	822.2/093-II-KGB/BKPP	15	 
4	Fungsional Umum	II/b	01/05/2015	822.2/088-IV-KGB/BKD	13	 
5	Pelaksana	II/b	01/05/2013	822.2/097-IV-KGB/BKD	11	 

Form Input KGB

Dasar KGB

No. SK

Oleh Pejabat

822.3/1512-I-KGB/BKPSDM

Kepala BKPSDM

Tahun

Bulan

Gaji

15

0

2660000

Tanggal SK

TMT KGB

08-12-2022

01-01-2023

Data KGB

No. SK

Oleh Pejabat

Tahun

Bulan

Gaji

17

0

2743800

Tanggal SK

TMT KGB

Tanggal Cetak

01-01-2025

Close

Simpan



Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi e – presensi 3. Aplikasi e – parkir 4. Aplikasi e – perpustakaan 1. Aplikasi Perijinan DPMPTSP
2.	2021	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Pemeliharaan aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi BPBD 3. Aplikasi Website BPKPAD 2. Aplikasi Call Center 112
3.	2022	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi E-Kinerja 2. Aplikasi Pajak Online 3. Aplikasi Video Analytic 1. Aplikasi Call Center 112
4.	2023	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi Dashboard TCC 2. Pengembangan Aplikasi tarakankota.go.id 3. Pengembangan Aplikasi PD 4. Pemeliharaan Aplikasi Penanaman Modal 5. Aplikasi Video Analytic 6. Aplikasi Call Center 112
5.	2024	6 Aplikasi	8 Aplikasi	133,33 %	1. Aplikasi Layanan Call Center 112 2. Aplikasi Video Analytic 3. Website Website JDIH (Pengembangan) 4. Website DKUKMP (Pengembangan) 5. PPDB Online (Pemeliharaan) 6. Aplikasi CCTV (Pengembangan) 7. Aplikasi Presensi BKPSDM (Pengembangan) 8. Aplikasi SIMPEG (Pengembangan)

Sumber Data : Laporan Bidang Aplikasi dan Informatika dan Laporan Konsolidasi Pembangunan 2024



Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator 1 : Nilai/Predikat Sakip

Indikator 1 : Nilai/Predikat Sakip

Nilai/Predikat Sakip adalah nilai atau predikat dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan

Untuk Nilai LHE Sakip Tahun 2024 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{nilai LHE Sakip}}{\sum \text{target yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi nilai Sakip DKISP adalah 79,55 atau dengan predikat BB dari target yang ditetapkan sebesar 79,55/BB atau tingkat capaian sebesar 100,00 %, penyebab tercapainya target LHE Sakip antara lain :

1. Penetapan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan.
2. Dokumen perencanaan dan keuangan telah dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
3. Evaluasi internal telah dilaksanakan dan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
4. Dokumen LKIP didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan *up to date* .

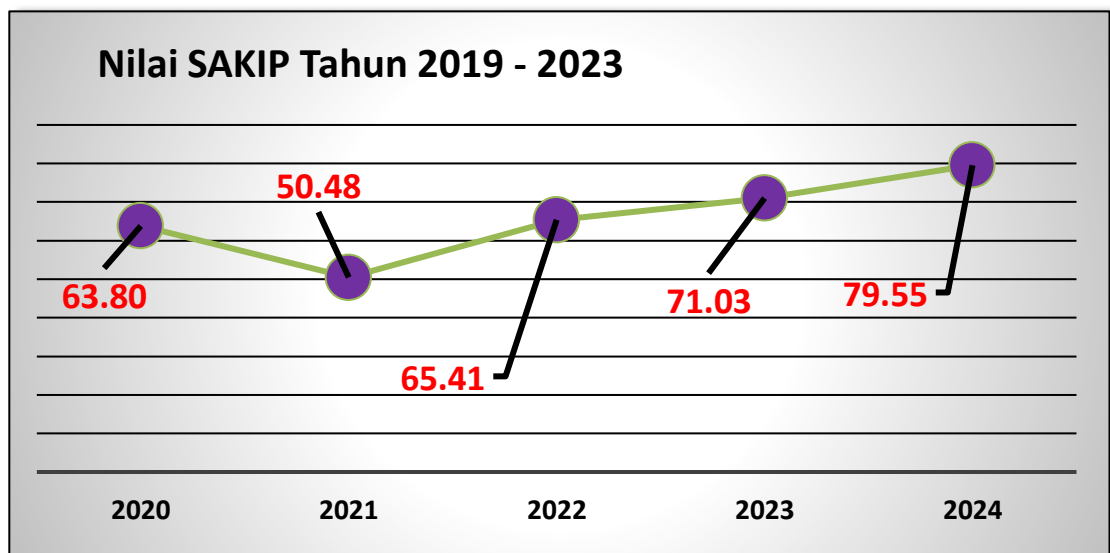
Untuk data LHE yang digunakan adalah nilai LHE Sakip tahun 2023 yang penilaiannya dilaksanakan tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Tarakan .

Target dan Realisasi Nilai Sakip dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :



No.	Tahun	Target Nilai/Predikat	Realisasi Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2020	65/B	63.80/B	Baik
2.	2021	65/B	50.48/CC	Cukup
3.	2022	70/B	65.41/B	Baik
4.	2023	70/B	71,03/BB	Sangat Baik
5.	2024	79,55	79,55/BB	Sangat Baik

Sumber data : LHE Sakip Tahun 2020 – 2024



C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :



- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja (Perangkat Daerah) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase PD yang terlayani infrastruktur jaringan	30 PD	30 OPD	100,00 %
2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	5 Jenis	5 Jenis	100,00 %
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	30 OPD	30 OPD	100,00 %
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	6 Aplikasi	8 Aplikasi	133,33 %
3	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Nilai/Predikat Sakip	79,55/BB	79,55/BB	100,00 %
CAPAIAN KINERJA					106,67 %



Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket.
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan	100,00 %	514.500.000	503.680.000	97,90	Efisien
2	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	Persentase media layanan informasi publik	100,00 %	1.416.959.332	1.371.264.000	96,78	Efisien
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	100,00 %	69.889.910	64.425.400	92,18	Efisien
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	133,33 %	403.315.000	341.130.057	84,58	Efisien
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat Sakip	100,00 %	5.356.251.127	5.088.272.493	95,00	Efisien
Total Capaian			106,67 %	7.760.915.369	7.368.771.950	94,95	Efisien

Tabel 3.6
**Analisis Dukungan SDM dalam
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Personil Pencapaian Sasaran		Jumlah
			ASN	Non ASN	
1	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	Persentase PD yang terlayani infrastruktur jaringan	4	-	4



2	Meningkatnya akses dan diseminasi Komunikasi dan Informasi yang Merata	Persentase media layanan informasi publik	4	-	4
		Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	2	1	3
		Jumlah aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	7	21	28
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DKISP	Nilai/Predikat Sakip	9	6	15
Jumlah			26	28	54

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Outcome/Output	Keuangan		Capaian (%)
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I.	Sasaran I : Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan					
	1.	Program Aplikasi Informatika				
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	514.500.000	503.680.000	97,90
	Jumlah Sasaran I			514.500.000	503.680.000	97,90



II.	Sasaran II : Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata					
	1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik				
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.302.007.092	1.278.654.000	98,21
	b.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70.000.000	67.980.000	97,11
	c.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	29.952.240	24.630.000	82,23
	d.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	15.000.000	-	0,00
	2.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	44.896.150	42.478.800	94,62
	b.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	9.994.130	9.734.100	97,40
	c.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah PD yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	14.999.630	12.212.500	81,42
	3.	Program Aplikasi Informatika				
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	168.319.400	127.204.052	75,57
	b.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	234.995.600	213.926.005	91,03
	Jumlah Sasaran II			1.890.160.242	1.776.819.457	94,00



III.	Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja DKISP					
	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	a.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.054.209.561	3.889.955.336	95,95
	b.	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	64.326.000	57.566.000	89,49
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.999.870	2.901.050	96,71
	b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	33.499.170	27.616.710	82,44
	c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9.999.810	8.448.560	84,49
	d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.335.600	21.188.016	67,62
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	267.757.886	251.990.000	94,11
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.664.400	88,81
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.060.000	337.576.930	92,98
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	240.000.000	214.545.700	89,39



		Dinas Operasional atau Lapangan				
	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	176.184.850	175.269.591	99,48
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	74.920.000	73.823.600	98,54
2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	a.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang ditetapkan	14.999.860	9.238.600	61,59
	b.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	9.999.970	7.865.000	78,65
	c.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	9.958.550	7.623.000	76,55
	Jumlah Sasaran III			5.356.251.127	5.088.272.493	95,00
	Total target, realisasi dan capaian anggaran			7.760.915.369	7.368.771.950	94,95

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran strategis sebesar **Rp. 7.368.771.950,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 7.760.915.369,-** sehingga serapan capaian menunjukkan angka **94,95 %**.

Selanjutnya untuk perbandingan anggaran dari masing-masing sasaran strategis dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.8
Perbandingan Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Strategis I	514.500.000	503.680.000	97,90
2	Strategis II	1.890.160.242	1.776.819.457	94,00
3	Strategis III	5.356.251.127	5.088.272.493	95,00
Total Capaian Anggaran		7.760.915.369	7.368.771.950	94,95

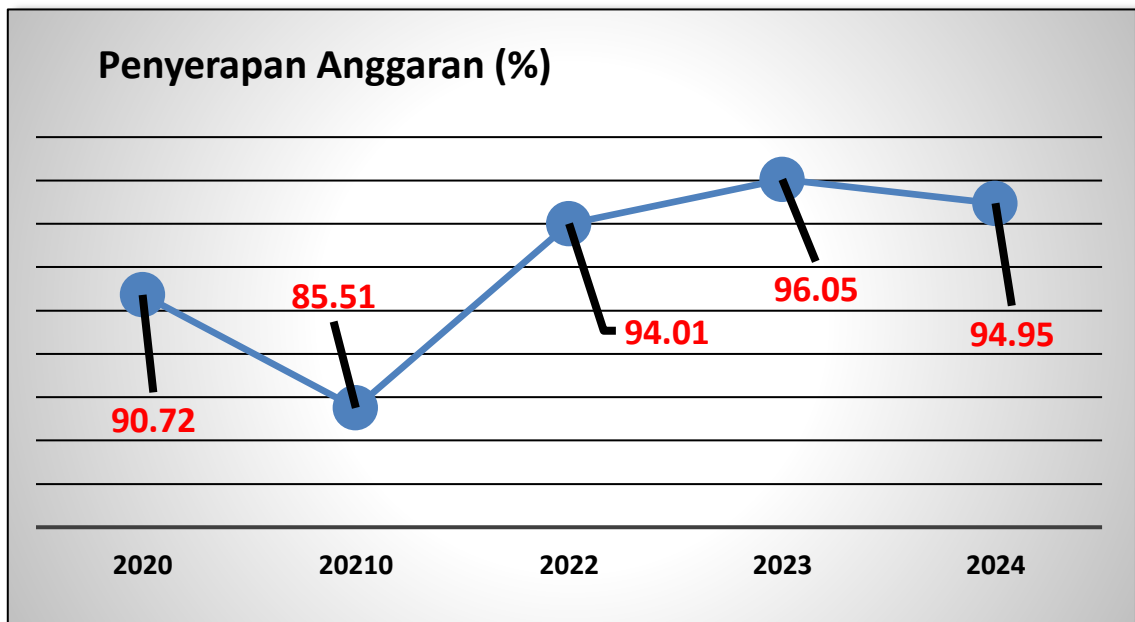
Perbandingan anggaran, realisasi, sisa anggaran dan persentase capaian realisasi anggaran pada Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2020 s/d 2024, disajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

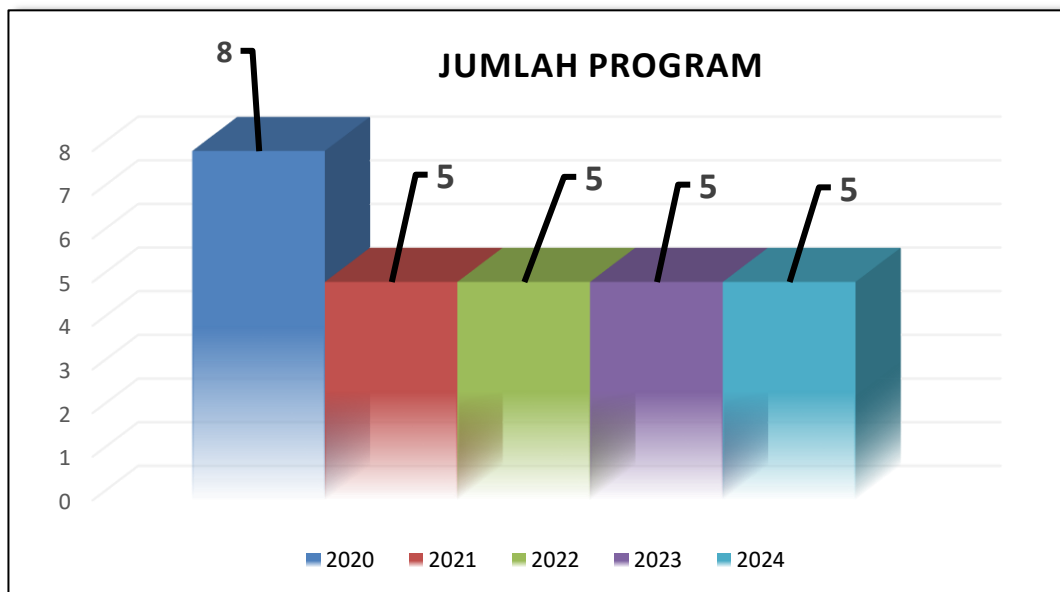
No.	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase realisasi(%)
1	2020	7.010.101.075	6.359.277.130	650.823.945	90,72



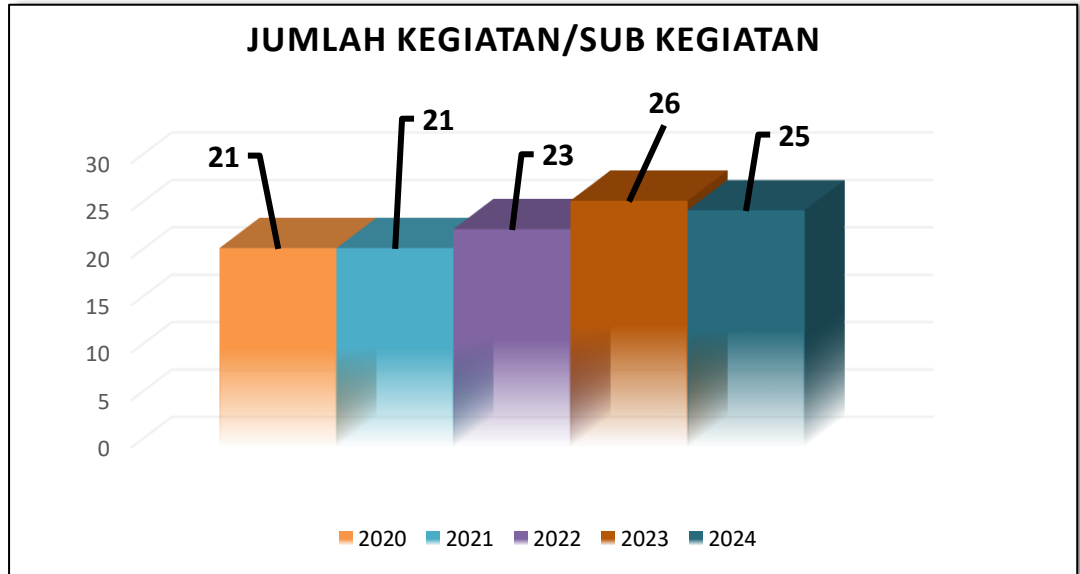
2	2021	6.436.615.087	5.504.052.973	932.562.114	85,51
3	2022	6.500.884.800	6.111.168.153	389.716.647	94.01
4	2023	6.981.387.107	6.705.604.815	275.782.292	96,05
5	2024	7.760.915.369	7.368.771.950	392.143.419	94,95



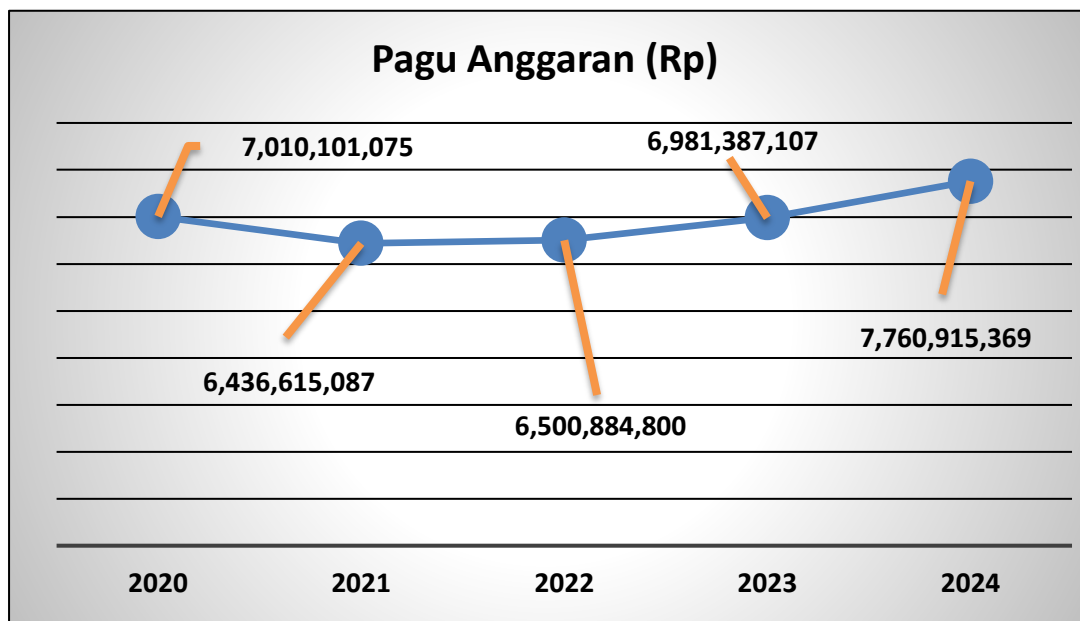
Grafik Tren Penyerapan Anggaran tahun 2020 – 2024 DKISP Kota Tarakan



Grafik Trend Jumlah Program Tahun 2020 – 2024 DKISP Kota Tarakan



Grafik Trend Jumlah Kegiatan Tahun 2020 - 2024 DKISP Kota Tarakan



Grafik Trend Pagu Anggaran Tahun 2020 – 2024 DKISP Kota Tarakan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 yang terdiri dari 3 sasaran dan 5 Indikator, adalah sebagai berikut:

- ❖ Capaian kinerja $90 \geq 100$ % kategori “sangat tinggi” sebanyak 3 sasaran atau 5 indikator dengan capaian 100,00 %; 5 indikator telah mencapai keberhasilan dengan predikat kinerja “sangat tinggi”;

B. Tindak Lanjut Perbaikan dan Peningkatan Kinerja

1. Menetapkan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan .
2. Dokumen LKIP akan dijadikan bahan evaluasi didalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya .
3. Dokumen LKIP akan dipublikasikan pada Website resmi DKISP Kota Tarakan dengan laman <http://dkisp.tarakankota.go.id/> sehingga memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi .



4. Melengkapi dokumen LKIP dengan didukung basis data yang kompeten dan dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya serta up to date .
5. Melakukan koordinasi dengan PD lain terkait pemanfaatan ruangan NOC dan Data Center untuk penyimpanan server aplikasi untuk perlindungan keamanan yang lebih baik .
6. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan PD dalam penyusunan dan pemanfaatan data Statistik Sektoral Kota Tarakan .
7. Meningkatkan integrasi data sektoral sehingga kecepatan dan akurasi penyajian data dapat diwujudkan .
8. Melaksanakan publikasi dan desiminasi informasi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan semua jaringan/saluran komunikasi dan informasi yang tersedia .

LAMPIRAN

**PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH KOTA TARA KAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**Perubahan
DPA-SKPD**

Nomor : DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp7.224.359.666,00	Rp7.220.569.991,00	(Rp3.789.675,00)	(0.05)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp4.103.490.486,00	Rp4.118.535.561,00	Rp15.045.075,00	0.37
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.120.869.180,00	Rp3.102.034.430,00	(Rp18.834.750,00)	(0.61)
5	2		BELANJA MODAL	Rp514.411.578,00	Rp540.345.378,00	Rp25.933.800,00	4.80
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp374.624.086,00	Rp400.557.886,00	Rp25.933.800,00	6.47
5	2	06	Belanja Modal Aset	Rp139.787.492,00	Rp139.787.492,00	Rp0,00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
				(Rp)	(%)
	Lainnya				
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)			
Januari		Rp0,00	Januari	Rp408.021.561,00	
Februari		Rp0,00	Februari	Rp428.846.061,00	
Maret		Rp0,00	Maret	Rp2.399.718.451,00	
April		Rp0,00	April	Rp545.917.281,00	
Mei		Rp0,00	Mei	Rp191.585.745,00	
Juni		Rp0,00	Juni	Rp119.110.200,00	
Juli		Rp0,00	Juli	Rp1.133.685.827,00	
Agustus		Rp0,00	Agustus	Rp585.448.435,00	
September		Rp0,00	September	Rp98.847.485,00	
Oktober		Rp0,00	Oktober	Rp702.902.041,00	
November		Rp0,00	November	Rp873.716.082,00	
Desember		Rp0,00	Desember	Rp273.116.200,00	
Jumlah		Rp0,00	Jumlah	Rp7.760.915.369,00	

Tarakan, Tanggal 26 September 2024
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
 PERSANDIAN

dr. Witoyo
 NIP. 196501112000121002

Mengesahkan,
 PRKD

Amirullah, SE
 NIP. 197904141998031011

34

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH										FORMULIR PERUBAHAN DOK-DELANJA SKPD									
KOTA TARAMAKAN TAHUN ANGGARAN 2024																			
Nomor LPPA		DPM/IA/32/16.3.20.2.45.014000/01/2024																	
SKPD		3.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian																	
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan																			
Urutan	Belanja Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											
								T+1	Tahun					Bertambah / (Berkurang)					T+1
									Sebelum					Setelah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								Rp7.224.359.666,00	Rp514.411.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.738.771.244,00	Rp7.220.569.991,00	Rp510.349.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.730.919.369,00	0,28	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			Rp7.224.359.666,00	Rp514.411.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.738.771.244,00	Rp7.220.569.991,00	Rp510.349.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.730.919.369,00	0,28	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			Rp7.779.511.276,00	Rp514.411.578,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.293.922.854,00	Rp7.779.721.701,00	Rp510.349.378,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.290.071.079,00	0,29	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Rp6.070.814.106,00	Rp241.854.088,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.312.639.193,00	Rp5.053.834.061,00	Rp267.757.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.321.591.757,00	0,16	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp4.103.490.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.103.490.486,00	Rp4.103.490.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.103.490.486,00	0,37	
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Jasa dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Biaya Asuransi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.029.364.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.029.364.486,00	Rp4.029.364.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.029.364.486,00	0,37	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Biaya Asuransi Umum, Dana Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp4.326.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.326.000,00	Rp4.326.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.326.000,00	0,00	
2	16	01	2.08		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp74.403.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.403.850,00	Rp74.403.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.403.850,00	4,41	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Biaya Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp3.889.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.889.870,00	Rp3.889.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.889.870,00	0,00	
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Biaya Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp29.990.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.990.170,00	Rp29.990.170,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.990.170,00	10,48	
2	16	01	2.08	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Biaya Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp9.909.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.909.870,00	Rp9.909.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.909.870,00	0,00	
2	16	01	2.08	0009	Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Biaya Bagi Hasil	Kota Taramakan, Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp31.404.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.404.800,00	Rp31.325.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.325.600,00	10,221	

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah / (Berkurang)		T+1
								Tahun													
								Sebelum					Setelah								
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%		
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp0,00	Rp341.824.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.814.086,00	Rp0,00	Rp267.757.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.757.686,00	Rp25.933.600,00	9,69		
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp211.624.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp211.624.086,00	Rp0,00	Rp267.757.686,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp267.757.686,00	Rp25.933.600,00	9,69		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp238.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp238.000.000,00	Rp266.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp266.080.000,00	(Rp171.940,00)	(0,07)		
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Sewa Menyewa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumbat, Dayak, Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp535.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp535.000.000,00	Rp363.060.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp363.060.000,00	(Rp171.940,00)	(0,07)		
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp354.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp354.920.000,00	Rp481.104.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp481.104.850,00	Rp136.184.850,00	37,75		
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.000.000,00	Rp0,00	0,00		
2	16	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Sanitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp180.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp180.000.000,00	Rp176.164.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.164.050,00	Rp38.850,00	43,34		
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Sanitasi/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp14.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.920.000,00	Rp74.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp74.920.000,00	Rp60.000.000,00	80,09		
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Rp1.380.667.845,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.387.965.537,00	Rp1.389.051.640,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.059.332,00	Rp36.094.000,00	3,46		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp1.380.667.845,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.387.965.537,00	Rp1.389.051.640,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.059.332,00	Rp36.094.000,00	3,46		
2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Kertas dan Jasa-jasa Media Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Kota	Rp1.195.705.400,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.253.013.092,00	Rp1.244.698.400,00	Rp57.307.692,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.362.007.084,00	Rp66.306,00	0,78		
2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer	Kota Tarakan, Semua Kecamatan	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.000.000,00	Rp0,00	0,00		

Urutan	Bidang Utama	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Rp	%	f+1
								Tahun										Berlambah / (Berkurang)				
								Sebelum					Setelah									
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertugas	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertugas	Belanja Transfer	Jumlah					
						Unsur-Dana Bagi Hasil	Semua Kabupaten/Tase															
1	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp29.952.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.952.240,00	Rp29.952.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.952.240,00		Rp0,00		0,00	
2	16	02	2.01	0006	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.000.000,00		Rp0,00		0,00	
2	16	03			PROGRAM PEMERIKSAAN APLIKASI INFORMATIKA			Rp246.039.800,00	Rp215.279.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.039.800,00	Rp246.039.800,00	Rp215.279.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.039.800,00		(Rp30.804.400,00)		(1,3,3)	
2	16	03	3.00		Pengelolaan E-governance di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp246.039.800,00	Rp215.279.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.039.800,00	Rp246.039.800,00	Rp215.279.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.039.800,00		(Rp30.804.400,00)		(1,3,3)	
2	16	03	3.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp85.339.800,00	Rp82.479.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.339.800,00	Rp85.339.800,00	Rp82.479.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.339.800,00		Rp0,00		0,00	
2	16	03	3.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp85.000.000,00	Rp82.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00	Rp85.000.000,00	Rp82.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.000.000,00		(Rp3.000.000,00)		(0,00)	
2	16	03	3.02	0010	Pengembangan dan Penggunaan Rantai Data Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp67.200.000,00	Rp64.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00	Rp67.200.000,00	Rp64.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.200.000,00		(Rp3.000.000,00)		(0,00)	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00	Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00		Rp0,00		0,00	
2	20	02			PROGRAM PENYELIDIKAN STATISTIK SEKTORAL			Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00	Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00		Rp0,00		0,00	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00	Rp69.889.910,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.889.910,00		Rp0,00		0,00	
2	20	02	2.01	0001	Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Akses dan Distribusi Data Statistik Sektoral	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp44.898.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.898.750,00	Rp44.898.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.898.750,00		Rp0,00		0,00	
2	20	02	2.01	0003	Membarikan Metadata Statistik Sektoral	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten/Desa	Rp8.994.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.994.130,00	Rp8.994.130,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.994.130,00		Rp0,00		0,00	
2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Ketersediaan Statistik Sektoral	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan	Rp14.999.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.630,00	Rp14.999.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.999.630,00		Rp0,00		0,00	

Urutan	Bidang	Lembar	Program	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah / Berkurang	
									Revisi					Saldo						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertentu	Belanja Transfer	Jumlah	Saluran Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Tertentu	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
								Semua Kecamatan/Desa												
2	21					URUBAN PEMERINTAHAN BERANGGARAN PERSANDIAN			Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	
3	21		02			PROGRAM PENYELENGGAAN PERSANDIAN UNTUK PERUSAHAAN INFORMASI			Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	
4	21		02	2,01		Pengembangan Persandian untuk Pengembangan Informasi Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota			Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	
5	21		02	2,01	0001	Penerapan Kebijakan Tata Kelola Keuangan Informasi dan Jaringan Komunikasi Benda Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	
6	21		02	2,01	0002	Pelaksanaan Analisa Kebutuhan dan Pengoptimalan Sumber Daya Keuangan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	
7	21		02	2,01	0003	Pelaksanaan Kegiatan Penyempurnaan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	Rp34.958.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.958.380,00	0,00	

Rencana Realisasi (Bulan per Bulan)	
	(Rp)
Januari	Rp34.958.380,00
Februari	Rp34.958.380,00
Maret	Rp34.958.380,00
April	Rp34.958.380,00
Mei	Rp34.958.380,00
Juni	Rp34.958.380,00
Juli	Rp34.958.380,00
Agustus	Rp34.958.380,00
September	Rp34.958.380,00
Oktober	Rp34.958.380,00
November	Rp34.958.380,00
Desember	Rp34.958.380,00
Jumlah	Rp34.958.380,00

</

Evaluasi Terhadap RENJA PERUBAHAN
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
Tahun 2024

No	Satuan	Kode	Urutan / Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD/Renstra/sd Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD/Renstra/sd Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan		
						I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
	2	16	02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik, pemerintahan dan media massa, rata-rata per pemerintah	100 persen	1,575,146,632		14,800,000	214,815,960	1,140,409,600		1,371,264,000				2,361,463,600			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
	2	16	02	001	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			1,575,146,632		14,800,000	214,815,960	1,140,409,600		1,371,264,000	75.00%	41.93%		2,361,463,600	100.00%	100.00%					
1	2	16	02	201	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	1,440,737,892	4	0	16,000,000	0	209,500,000	0	1,053,154,000	4 Dokumen	1,278,854,000	100.00%	88.75%	8 Dokumen	2,142,484,000	100.00%	189.23%	
2	2	16	02	201	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	89,506,400	1	0	0	0	67,980,000	0	67,980,000	1 Dokumen	67,980,000	100.00%	75.85%	2 Dokumen	116,679,000	100.00%	129.42%	
	2	16	02	201	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	29,952,240			1	5,355,000	0	19,275,000	1 Dokumen	24,530,000	100.00%	82.23%	2 Dokumen	52,300,000	200.00%	174.47%		
	2	16	02	201	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	10,000,000			0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	1 Dokumen	50,000,000	100.00%	100.00%		
Rata-rata capaian kinerja (%)														75%		81.72%			100%	100.00%					
Predikat kinerja														S		R			BT	BT					
	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase keberhasilan jaringan internet (bandwidth) MOC/Batu Ceder	100 persen	517,819,260	140,594,000	135,831,740	85,009,220	481,025,197		844,810,000				1,827,439,100			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
	2	16	03	001	Penerapan Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang dapat diakses	100 persen	817,319,000	140,854,000	93,821,760	90,010,220	821,626,580		944,810,000	100.00%	98.17%		1,827,439,100	100.00%	78.56%					
4	2	16	03	202	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	160,319,400	0	3	12,862,000	0	2,840,000	3	111,801,482	6 Unit	127,204,052	150.00%	75.57%	10 Unit	253,576,000	125.00%	70.44%	
5	2	16	03	202	08	Penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	235,000,000	2	18,074,580	0	77,369,160	0	30,116,320	0	86,383,945	2 Layanan	213,826,000	100.00%	91.03%	4 Layanan	506,442,100	100.00%	62.52%
6	2	16	03	202	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	514,500,000	3	122,920,000	0	46,300,000	0	50,800,000	3 Dokumen	503,880,000	100.00%	97.89%	6 Dokumen	1,077,421,000	100.00%	90.54%		
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00%		88.17%			100.00%	78.58%					
Predikat kinerja														BT		T			BT	S					
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 persen	60,889,516		18,744,000		47,691,480		64,425,400				88,709,950			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
	2	20	02	001	Pengembangan Statistik Sektoral di Bidang Pemerintahan			60,889,516		18,744,000		47,691,480		64,425,400	100.00%	51.14%		88,709,950	100.00%	98.30%					
7	2	20	02	201	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	44,896,100	0	0	16,744,000	0	25,734,000	3 Dokumen	42,478,800	100.00%	94.62%	93 Dokumen	50,758,800	24.47%	126.30%			
8	2	20	02	201	02	Membangun Kapasitas Statistik Sektoral yang Dibutuhkan	Jumlah Metode Statistik Sektoral yang Dibutuhkan	2 Dokumen	9,994,100	0	0	0	0	9,734,100	2 Dokumen	9,734,100	100.00%	97.40%	75 Dokumen	17,688,600	41.67%	98.44%			
9	2	20	02	201	04	Peningkatan Kapasitas Kolaborasi Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitas Statistik Sektoral dari SP9	30 Orang	14,999,630	0	0	0	0	12,212,500	30 Orang	12,212,500	100.00%	81.42%	60 Orang	20,322,500	86.67%	101.51%			
Rata-rata capaian kinerja (%)														100.00%		81.14%			44.27%	96.15%					
Predikat kinerja														BT		BT			BR	BT					
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
	2	21	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keberhasilan keamanan informasi	100 persen	34,978,280						24,726,800				30,129,700			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian				
	2	21	02	001	Pengembangan Penerimaan dan Pengiriman Informasi Pemerintahan Daerah			34,978,280						24,726,800	100.00%	72.30%		30,129,700	100.00%	88.16%					
10	2	21	02	201	01	Peningkatan Kelembagaan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kelembagaan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	14,999,800	0	0	0	0	9,238,600	1 Dokumen	9,238,600	0.00%	61.59%	1 Dokumen	17,941,500	50.00%	128.16%			
11	2	21	02	201	02	Pelaksanaan Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	1 Laporan	9,999,970	0	0	0	2,800,000	1	5,065,000	1 Laporan	7,865,000	100.00%	75.85%	1 Laporan	7,865,000	50.00%	64.47%		
12	2	21	02	201	03	Pelaksanaan Kelembagaan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kelembagaan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	9,998,509	0	0	0	0	7,623,000	1 Laporan	7,623,000	100.00%	76.55%	2 Laporan	13,323,000	100.00%	151.40%			
Rata-rata capaian kinerja (%)														99.67%		72.30%			88.67%	88.16%					
Predikat kinerja														S		S			S	T					



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121

Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id>

Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Februari 2025

Inspektur,



ABD KAZIS HASAN, A.P, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19750212 199501 1 001

KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-

LEMBAR ASISTENSI KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : DKLSP

Tanggal : 05 Feb. 2025

Indikator Penilaian		Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1.	LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	✓	Perhitungan Capaian kinerja tdk sesuai dgn PK (Pd PK "2a" pada Perhitungan "2um lah")	f 20/02
2.	LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	✓		f
3.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	✓		f
4.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	-	-		f
5.	LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	✓		f
6.	LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	✓	analisis rc disampingkan belum memadai	f 20/02
7.	LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	✓	masih terdapat analisis rc belum memadai	f 20/02

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	-	-		f
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓		f
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah				
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan				
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan				
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja				
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan				

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Kalimantan No.1 ☎ 082155068958

Email: dkisp@tarakankota.go.id Web site : <http://dkisp.tarakankota.go.id/>

T A R A K A N (Kode Pos 77131)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

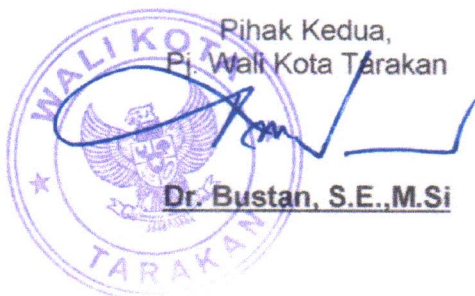
Nama : **dr. Witoyo**
Jabatan : Kepala Dinas
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

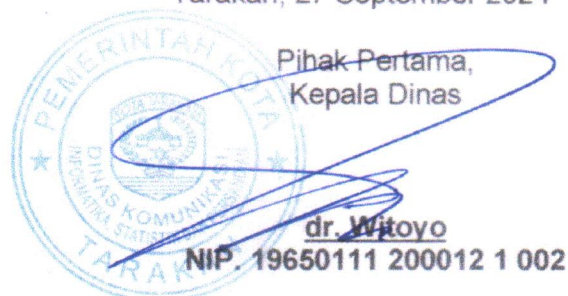
Nama : **Dr, Bustan, S.E.,M.Si**
Jabatan : Pj. Wali Kota Tarakan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 27 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan

Dr. Bustan, S.E.,M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

dr. Witoyo
NIP. 19650111 200012 1 002



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln. Kalimantan No.1 ☎ 082155068958

Email: dkisp@tarakankota.go.id Web site : <http://dkisp.tarakankota.go.id/>

T A R A K A N (Kode Pos 77131)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN

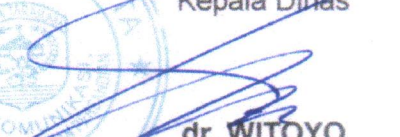
No.	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya layanan infrastruktur jaringan	1.	Persentase PD yang terkoneksi bandwidth server	100 % (30 OPD)
2.	Meningkatnya akses dan diseminasi komunikasi dan informasi yang merata	2.	Persentase media layanan informasi publik	100 % (5 jenis)
		3.	Persentase PD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral	100 % (30 OPD)
		4.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi	100 % (6 aplikasi)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DKISP	5.	Nilai/predikat SAKIP	79,55/BB

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.321.292.747,-	APBDP
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 1,416,959,332,-	APBDP
3. Program Aplikasi Informatika	Rp 917.815.000,-	APBDP
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 69.889.910,-	APBDP
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 34.958.380,-	APBDP
Total DPPA Tahun 2024 :	Rp 7.760.915.369,-	

Tarakan, 27 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan

Dr. Bustan, S.E., M.Si

Pihak Pertama,
Kepala Dinas

dr. WITOYO
NIP. 19650111 200012 1 002